

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN**

(Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
Pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama
Prodi Pemikiran Politik Islam

Oleh :

ANDRE PRATAMA KASSYA
1831040025



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN**

(Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun
2022)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)

Disusun Oleh :

Andre Pratama Kassya

1831040025

Pembimbing I : Drs. Efendi, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si



PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

TAHUN 1444 H/2023 M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Sungkai Jaya Tahun 2022, Penelitian ini menggunakan konsep yang diambil dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa pelaksanaan Musrenbang harus mewajibkan pemerintah desa untuk mengakomodir masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung maupun perwakilan, menyesuaikan keadaan desa. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Musrenbang.

Peneliti bertujuan mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang melihat dari kesesuaian usulan dan kehadiran dalam rapat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field research* yaitu data yang diambil atau diperoleh secara langsung dilapangan. Sumber Data Primer menggunakan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Hasil data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama yang didapatkan secara langsung di lapangan yang dihasilkan dari wawancara pada responden atau informan, lalu dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. sumber data primer untuk dijadikan sampel adalah Aparatur Kecamatan yakni Camat, Aparatur Desa yakni 5 orang Kepala Desa dan 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Tokoh Masyarakat dan juga 1 orang anggota Masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terbilang sangat rendah, Terlihat pada Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan di tiap tiap Desa, karena beberapa faktor yakni kekecewaan masyarakat terhadap hasil musrenbang kecamatan menjadi salah satu nya karena hanya 1-2 prioritas usulan kegiatan per desa yang bisa di usulkan menjadi usulan prioritas kecamatan, selain itu sudah mempercayakan kepada yang sudah paham, lalu Faktor Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Masih dalam Suasana Pandemi, lalu Kesesuaian hasil usulan Musrenbang sudah cukup baik, Namun terbatas nya anggaran membuat semua usulan tidak bisa semua nya terealisasi dan ada usulan usulan yang muncul pada saat musrenbang desa namun usulan tersebut tidak berasal dari usulan dusun dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih terbilang kurang, karna hanya berupa sosialisasi dan undangan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, UU No 6 tahun 2014 tentang desa

ABSTRACT

This study aims to determine Community Participation in the implementation of Development Plan Deliberations in Sungkai Jaya District in 2022. This research uses a concept taken from Law Number 6 of 2014 concerning Villages, That the implementation of Musrenbang must oblige the village government to accommodate the community in every village development activity either directly or through representatives, according to village conditions. So that community participation is very important in the implementation of the Musrenbang.

The researcher aims to determine Community Participation in the Musrenbang implementation process by looking at the suitability of the proposals and attendance at the meeting. This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research, namely data taken or obtained directly in the field. Primary data sources use a purposive sampling technique where the sampling technique is with certain criteria. The results of data collected directly by researchers from the main sources obtained directly in the field resulted from interviews with respondents or informants, then in data collection using interview, observation and documentation methods. Primary data sources to be sampled are District Apparatus, namely the Sub-District Head, Village Apparatus, namely 5 Village Heads and 1 Village Secretary, 2 Community Leaders and also 1 Community Leader.

The results of this study are Community Participation in the Development Planning Deliberation Forum (Musrenbang) is relatively low, seen in the Minutes of Development Planning Deliberations in each village, due to several factors namely community disappointment with the results of the sub-district musrenbang being one of them because only 1-2 priorities activity proposals per village that can be proposed as sub-district priority proposals, apart from that have entrusted those who already understand, then Economic Factors, Human Resources, and Still in a Pandemic Atmosphere, then the suitability of the results of the Musrenbang proposals is quite good, but the limited budget makes all of the proposals could not all be realized and there were suggestions that appeared during the village musrenbang but these proposals did not originate from hamlet proposals and the efforts made by the government to increase community participation were still lacking, because they were only in the form of outreach and invitations.

Keyword : society participation, Musrenbang, Law No. 6 of 2014 concerning villages

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Andre Pratama Kassya
NPM : 1831040025
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi agama

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)”** adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplak karya orang lain kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis



Andre Pratama Kassya

1831040025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul skripsi : **Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan
Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi
Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2022)**

Nama : **Andre Pratama Kassya**
NPM : **1831040025**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Effendi, M.Hum
NIP. 195807211986031004


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam


Abd Qohar, M.Si
NIP. 197103122005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)”, Disusun oleh Andre Pratama Kassya, NPM: 1831040025, Jurusan Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, pada hari/tanggal: Jumat, 24 Maret 2023, pukul 09.30-11.00 WIB.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Drs. A. Zaeny, M.Kom.I 

Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes. 

Pembahas Utama : Abd. Qohar, M.Si 

Pembahas I : Drs. Effendi, M.Hum 

Pembahas II : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si 

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama




Dr. Ahmad Isaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَأَلِإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”¹

(Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 4789)

¹Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4789 - Kitab Nikah, <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4789>, diakses pada 27 Febuari 2023, pukul 09.20

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas segala nikmat yang-Kau berikan. Alhamdulillahirobbilalamin rasa penuh syukur yang tak ada hentinyaku panjatkan pada-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang selalu senantiasa berusaha, berfikir, dan beriman kepada-Mu, serta selalu diberikan kesabaran untuk terus berusaha dan menjalankan kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kuimpikan sejak lama dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahku yang luar biasa Bapak Ridwan Efendi, SE dan Ibuku tersayang Ibu Mirda Nila yang selalu memberikan support dan bimbingan sepenuh hati agar terus menjadi insan yang lebih bermanfaat lagi. Terimakasih mungkin tidaklah cukup untuk membalas semua namun doa selalu diriku panjatkan pada Allah SWT untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Untuk kedua Adik adikku Muhammad Fadhil dan Reni Jayanti semoga bisa mencapai segala keinginan dan mimpi mimpi serta membuat bangga kedua orang tua .
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung semoga segala ilmu yang didapat selama perkuliahan bermanfaat untuk seluruh mahasiswa.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama Andre Pratama Kassya, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Ridwan Efendi, S.E dan Ibu Mirda Nila. Lahir di Negara Batin, pada tanggal 26 Januari Tahun 2001.

Pendidikan yang penulis tempuh dimulai pada tahun 2005 penulis menyelesaikan Pendidikan di TK Aisyah Cempedak, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Lalu dilanjutkan pada tahun 2006 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN O2 Kotabumi Tengah dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 04 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melakukan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Kotabumi dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian menempuh jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Prodi Pemikiran Politik Islam dan diselesaikan pada tahun 2023.

Peneliti juga aktif dalam mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra kampus, Peneliti pernah menjadi Ketua Biro Media dan Opini Publik Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi agama periode 2020-2021, kemudian menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Periode 2021-2022, peneliti juga pernah menjadi Ketua Biro Media dan Opini Publik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin dan Studi Agama Periode 2021-2022.

Bandar Lampung, Febuari 2023
Penulis

Andre Pratama Kassya
1831040025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. Ahmad Isnaeni, MA** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, LC, M.A.**, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan serta motivasi semasa dibangku kuliah.
4. Bapak **ABD. Qohar, M.SI** selaku Ketua Progam Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dan
5. Bapak **Drs. Efendi, M.Hum** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan maupun saran pada penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Tin Amalia, M.Si** selaku pembimbing II terima kasih atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak **Gesit Yudha, M.IP**, Ibu **Citra Wahyuni, M.Si**, Ibu **Dwi Rosmawati** dan beserta jajaran staf prodi Pemikiran Politik Islam.
8. Seluruh staff dosen dan staff perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan

yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

9. Bapak **Des Putra Adami** selaku Camat di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kecamatan ini.
10. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terutama di Jurusan Pemikiran Politik Islam angkatan 2018 khususnya **PPI 18 Kelas A** yang tidak bisa disebutkan Namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanannya selama ini, sedikit dan banyak memberikan pengalaman hidup yang tak terulang.
11. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya **PMII Rayon Ushuluddin dan Studi agama**, Terima Kasih telah memberi banyak sekali Ilmu, Pengalaman, Relasi dan hal hal lain yang tidak akan cukup jika ditulis semua.
12. Rekan Rekan di Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Khususnya rekan rekan di kepengurusan **Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)** Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama periode 2020-2021 dan 2021-2022. Terimakasih telah kebersamai mengawal dan berproses sampai selesai.
13. Adin Sa'ani, um maulana, buntut bada, mahdewa, um saleh dan semua nya, trimakasih sudah memberi tempat tinggal yang nyaman di Bandar Lampung.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini telah dilakukan dengan segala usaha semaksimal mungkin. Namun tentunya masih ada banyak kekurangan dan keterbatasan dalam karya ilmiah ini. Oleh karenanya diharapkan segala saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan tulisan ini. Dan semoga bias bermanfaat bagi peneliti maupun peneliti selanjutnya

Bandar Lampung, Febuari 2023
Penulis

Andre Pratama Kassya
1831040025

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	14
I. Kerangka Teoritik.....	20
J. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II LANDASAN TEORI MUSRENBANG

A. Partisipasi Masyarakat	23
1. Definisi Partisipasi Masyarakat	23
2. Bentuk Partisipasi	25
B. Musyawarah Rencana Pembangunan	28
1. Musreimbang Kecamatan	29
2. Tujuan Musreimbang Kecamatan	31
C. Konsep Tentang Perencanaan Pembangunan.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Sungkai Jaya	35
B. Kondisi Geografis.....	36
C. Penduduk	37
D. Sarana dan Prasarana Pendidikan	38
E. Mata Pencaharian	39
F. Potensi	40
G. Visi misi Kecamatan Sungkai Jaya	40
H. Struktur Organisasi Kecamatan Sungkai Jaya	42

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG

A. Proses Terjadinya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022	45
B. Hasil Musyawarah Rencana Pembangun (Musrenbang) Kecamatan Sungkai Jaya Tahun 2022.....	53
C. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Stakholder Kecamatan/Desa	17
Tabel 1.2	Data Sekunder	17
Tabel 2.1	Keadaan luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Sungkai Jaya	36
Tabel 2.2	Luas Desa berdasarkan Penggunaan Lahan.....	37
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk	38
Tabel 2.4	Sarana Prasarana Pendidikan	38
Tabel 2.5	Mata Pencaharian Penduduk	39
Tabel 3.1	Daftar hadir musyawarah Dusun 01	55
Tabel 3.2	Daftar hadir musyawarah dusun 02	56
Tabel 3.3	Daftar hadir musyawarah dusun 03	58
Tabel 3.4	Daftar hadir musyawarah Dusun 04	59
Tabel 3.5	Daftar hadir musyawarah Dusun 05	60
Tabel 3.6	Daftar Hadir Musrenbang Desa Sri Jaya	63
Tabel 3.7	Usulan Musrenbang Desa Sri Jaya	64
Tabel 3.8	Daftar Hadir Musrenbang Desa Leping tengah	65
Tabel 3.9	Usulan Musrenbang Desa Leping Tengah	67
Tabel 3.10	Daftar Hadir Musrenbang Desa Cempaka Timur	68
Tabel 3.11	Usulan Musrenbang Cempaka Timur	70
Tabel 3.12	Daftar Hadir Musrenbang Desa Negara Agung	71
Tabel 3.13	Usulan Musrenbang Desa Negara Agung	72
Tabel 3.14	Daftar Hadir Musrenbang Desa Cempaka Barat	74
Tabel 3.15	Usulan Musrenbang Desa Cempaka Barat	75
Tabel 3.16	Daftar Hadir Musrenbang Desa Cempaka	76
Tabel 3.17	Usulan Musrenbang Desa Cempaka	78
Tabel 3.18	Daftar Hadir Musrenbang Desa Sri Agung	79
Tabel 3.19	Usulan Musrenbang Desa Sri Agung	80
Tabel 3.20	Daftar Hadir Musrenbang Desa Cahaya Makmur	81
Tabel 3.21	Usulan Musrenbang Desa Cahaya Makmur	83
Tabel 3.22	Daftar Hadir Musrenbang Desa Suka Jaya	84
Tabel 3.23	Usulan Musrenbang Desa Suka Jaya	85
Tabel 3.24	Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan	87
Tabel 3.25	Daftar usulan kegiatan prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori20

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kecamatan Sungkai Jaya.....43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara	105
Lampiran 1.2 Transkrip Hasil Wawancara	109
Lampiran 1.3 Dokumentasi	137





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam membuat sebuah skripsi, hal pertama yang harus dilakukan agar terhindar dari hal yang tidak sesuai dan salah paham akan judul, sehingga perlu sesuatu yaitu sebuah penegasan judul penelitian dalam skripsi ini, sehingga bisa selaras dengan ketentuan dan penafsiran yang akan menimbulkan pemahaman akan judul ini yakni “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan” (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022). Sehingga diperlukannya penjelasan dalam sebuah pengertian dari istilah judul tersebut, adapun penjelasan dalam pengertian dari istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut :

Partisipasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keikutsertaan atau turut serta dalam suatu kegiatan.¹ **Partisipasi masyarakat** dalam musyawarah rencana pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan kegiatan kegiatan dalam pembangunan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur demokrasi, karna merupakan hasil musyawarah mufakat untuk kepentingan Bersama.

Musyawarah rencana pembangunan atau biasa disingkat musrenbang adalah mekanisme perencanaan, sebuah kelembagaan perencanaan yang terdapat di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan di agendakan oleh pemerintah (top down planning)². Musrenbang merupakan sebuah prosedur yang menjadi tempat untuk mempertemukan antara apa yang menjadi kebutuhan

¹ Kamus besar Bahasa Indonesia- partisipasi.
<https://kbbi.web.id/partisipasi> diakses pada 27 July 2022 pukul 09.22

² Ahmad Mustanir, P. A. (*Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. Jurnal Politik Profetik, (2017) hal 248.

masyarakat dan melihat pemerintah dalam merespon hal tersebut.³ Setelah pelaksanaan musrenbang akan ada usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang dihasilkan dalam forum musrenbang.

Tahapan Musrenbang dilaksanakan dari mulai tingkatan Dusun/kelurahan sampai dengan tingkatan provinsi. **Musrenbang** dimulai dari musyawarah dusun (Musdus), Musyawarah dusun di kecamatan Sungkai Jaya dilaksanakan di 49 dusun yang tersebar di 9 desa. Musyawarah dusun/kelurahan menjadi tahapan pertama dalam musrenbang, lalu setelah dilakukan musyawarah dusun, dilakukan lah musyawarah desa yang tujuannya adalah menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai oleh APBD Desa, alokasi dana Desa, APBD Kabupaten atau sumber pendanaan lainnya, menampung aspirasi masyarakat dari tingkat dusun lalu menentukan prioritas kegiatan yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan. Musrenbang Desa meliputi bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya serta fisik dan prasarana. Terdapat 9 desa di Kecamatan Sungkai Jaya kabupaten Lampung Utara, setelah musrenbang desa ada musrenbang kecamatan, dalam tahapan ini memiliki tujuan yaitu membahas dan menetapkan hasil hasil dari musrenbang ditingkat dibawahnya yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Sungkai Jaya kabupaten Lampung Utara, Musrenbang Kecamatan Sungkai Jaya Menetapkan 17 usulan prioritas pembangunan kecamatan Sungkai Jaya dari 52 Usulan⁴. Membahas lalu menetapkan prioritas usulan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, lalu Melaksanakan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten. Lalu musrenbang kabupaten dan musrenbang provinsi.

Dalam menentukan keberhasilan musyawarah rencana pembangunan, perlu nya peran dari masyarakat sekitar dalam

³ Wibowo Baso Frianto. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. Hal 7

⁴ Wawancara dengan Bapak Des Putra Adami, Camat Sungkai Jaya pada 9 Januari 2023 di Kantor Kecamatan Sungkai Jaya

memberikan kritikan dan masukan dan hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, Sehingga sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut.

Berdasarkan istilah istilah penelitian diatas maka maksud penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)” adalah untuk mengetahui keterlibatan dan kehadiran masyarakat dalam merespon kebutuhan yang ada di desa dan untuk melihat kesesuaian usulan tiap tingkatan serta mengetahui proses terjadinya partisipasi masyarakat serta hasil usulan Musrembang.

B. Latar Belakang Masalah

Proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negara ini, Yang menjadi aspek utama dalam proses pengambilan kebijakan adalah masyarakat. Masyarakat memiliki hak atas berjalannya suatu pembangunan yang ingin dikehendaki. Hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas atas segala kepentingan pihak mana pun baik itu secara individu maupun golongan. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat melampiaskan semua permasalahan yang akan dihadapi, selanjutnya akan menemukan solusi bersama. Sehingga masyarakat memiliki posisi strategis dan penting dalam sebuah pembangunan.

Untuk memajukan sebuah daerah, dibutuhkan strategi pembangunan pedesaan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk ikut aktif dalam pembangunan, partisipasi masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menentukan pembangunan yang ideal. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam setiap proses pembangunan menggambarkan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Masyarakat mempunyai peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang

sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan⁵.

Partisipasi masyarakat merupakan proses pengambilan peran dari seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi sebuah masalah, pengambilan keputusan serta memberikan alternatif solusi melalui pikiran, waktu, materi, keahlian atau modal terhadap sebuah program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan kegiatan dalam pembangunan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk sederhana, partisipasi dapat dimaknai sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam mengatur kegiatan dan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan.

Partisipasi masyarakat juga berperan sebagai sarana saran dan masukan, proses partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan yakni, mulai dari penerimaan informasi, merespon tanggapan dalam informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan hasil. masyarakat bukan hanya ikut serta dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi mereka juga mampu mengeksplorasi, mencerna serta mengungkapkan permasalahan yang sedang mereka hadapi.⁶

Pembangunan akan terselenggara dengan baik apabila masyarakat terlibat langsung proses nya, selain itu perencanaan yang baik menjadi penunjang pembangunan yang baik. Oleh sebab itu, proses perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, salah

⁵ Eko Supeno. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol 18, No 2 (2015) hal 1-5

⁶ Deviyanti, Dea. "Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah." *Jurnal Administrasi Negara* 1.2 (2013): hal 387.

satu forum yang harusnya menjadi wadah untuk hal tersebut adalah forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan sebuah mekanisme perencanaan, kelembagaan perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan di agendakan oleh pemerintah (*top down planning*). Musrenbang merupakan sebuah prosedur yang menjadi tempat dalam mempertemukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta bagaimana pemerintah merespon hal tersebut⁷.

Dalam melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal tersebut menetapkan bahwa musrenbang harus dilakukan secara partisipatif, akuntabel, dan transparan dengan melibatkan semua stakeholders termasuk kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Kontribusi masyarakat dalam Musrenbang dapat berupa usulan, kritikan, dan kehadiran dalam proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, Partisipasi Masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan, bisa terlihat dari kehadiran dalam Musrenbang, diskusi, sumbangsih Pemikiran serta penolakan terhadap program yang ditawarkan, yang dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah proses pembangunan dapat dilihat dari proses partisipasinya.

Pembangunan yang baik efektif akan berjalan apabila dimulai dengan sebuah perencanaan yang efektif juga, maka bisa dilaksanakan oleh semua pelaksana pembangunan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, maka sebuah musyawarah dan perencanaan harus memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah rencana pembangunan.

⁷ Eppy Lugiarti, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti*, (2004) hal 40

Pentingnya akan hadirnya musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memutuskan dan mencari sebuah hasil yang mufakat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran (3): 159 adalah sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”⁸

Isi dalam kandungan ayat suci Al-Qur’an di atas menjelaskan akan begitu berpengaruh nya sebuah kegiatan musyawarah disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal memilah sebuah kebijakan mengenai kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah. Dengan cara musyawarah/mufakat, masyarakat dapat menentukan sebuah kebijakan pembangunan secara kolektif dengan menghasilkan suatu kepentingan yang bisa dirasakan Bersama.

Musrenbang menjelaskan gambaran tentang bagaimana forum tersebut melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran. Selain itu faktor yang menentukan terlaksana dan berhasil nya sebuah pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Di dalam sebuah proses Musyawarah, keterlibatan setiap elemen elemen sangatlah penting. Karena, Melalui proses pendampingan dalam sebuah perencanaan pembangunan ini, akan dapat terlaksana

⁸ Nur Shofiati. *Nilai-nilai Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an (Studi Kepustakaan Surat Ali-Imron Ayat 159-160 Dalam Kitab Tafsir Misbah Karangan Muhammad Quraish Shihab)*. (2020) Hal 4

dan berhasilnya sebuah program pembangunan daerah yang pas dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁹

Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa pelaksanaan Musrenbang harus mewajibkan pemerintah desa untuk mengakomodir masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung maupun perwakilan, menyesuaikan keadaan desa. Oleh sebab itu peneliti mengambil indicator bagaimana kesesuaian hasil usulan dari tingkatan paling bawah yakni Musyawarah Dusun sampai Musrenbang Kecamatan selain itu peneliti melihat dari daftar kehadiran tiap musyawarah untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat.

Keterlibatan Masyarakat pada tiap jenjangnya akan mempengaruhi proses pelaksanaan musyawarah pada tiap tingkatan. Karna masyarakat lah yang mengetahui kebutuhan dan kondisi desa tersebut. Kritik dan masukan dari masyarakat sangatlah penting, oleh sebab itu partisipasi masyarakat menjadi penting. Berbagai cara atau Upaya upaya yang sudah dilaksanakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah dilakukan. Namun, sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah kecamatan masih terkendala oleh keterbatasan SDM dan teknologi serta terkendala Pandemi Covid 19¹⁰.

Pada forum musyawarah tingkat dusun saja, untuk melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Musyawarah Dusun harus menggunakan Pengeras Suara Masjid/Musola¹¹. karena daerah tersebut masih terkendala sinyal dan tidak merata nya masyarakat yang memiliki smartphone yang mendukung, selain itu Faktor Ekonomi dan Kurang nya kualitas SDM menjadi permasalahan pada partisipasi Masyarakat. Selain itu hasil dari usulan kegiatan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena Rapat yang dilakukakn masyarakat tidak menjadi angin lalu saja apabila usulan yang berasal dari bawah tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam forum Musreimbang

⁹ Riris Ardhanariswari dkk. Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), (2017) hal 635

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Des Putra Adami, Camat Sungkai Jaya pada 9 Januari 2023 di Kantor Kecamatan Sungkai Jaya

¹¹ Wawancara dengan bapak Firman, Masyarakat Negeri Agung pada 13 Januari 2023, dikediaman Bapak Firman

kecamatan dan tingkatan selanjutnya.

Menurut Tokoh Masyarakat desa Suka Jaya hasil usulan prioritas sudah sesuai dengan kemauan masyarakat “*Oh, iya jelas karna itu adalah hasil dari keputusan Bersama*”¹². Walaupun tidak semua usulan bisa terlaksana, karena terbatasnya anggaran.

Penelitian ini akan sangat berguna, karena penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui keterlibatan dan kehadiran masyarakat dalam mengusulkan permasalahan yang ada di desa nya serta upaya yang dilakukan dan bagaimana kesesuaian hasil usulan prioritas pembangunan Kecamatan Sungkai Jaya.

Dari penjelasan yang sudah di paparkan dalam latar belakang diatas, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan” (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022).

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang masalah untuk lebih terarah peneliti memfokuskan penulisan pada bagaimana proses pelaksanaan musrenbang dan upaya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang serta kesesuaian hasil usulan musrenbang

2. Sub Fokus Penelitian

Sub focus penelitian diantaranya :

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam musrenbang
- Hasil musrenbang kecamatan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas maka ditentukanlah yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

¹² Wawancara dengan Bapak Hermansyah, Tokoh Masyarakat Desa Sri Jaya Pada 13 Januari 2023, di kediaman Bapak Hermansyah

1. Bagaimana proses terjadinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sungkai Jaya?
2. Bagaimana Hasil usulan prioritas pembangunan Kecamatan Sungkai Jaya Tahun 2022?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dapat diketahui bahwasannya setiap langkah dan usaha guna mencapai suatu tujuan yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sungkai Jaya.
2. Untuk mengetahui hasil usulan prioritas pembangunan kecamatan Sungkai Jaya pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Sungkai Jaya tahun 2022

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan bagi peneliti dari hasil penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan bagi akademisi mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.
- b. Sebagai sumber kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- Bagi instansi Kecamatan Sungkai Jaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan masukan masukan bagi aparatur pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara.

- Sebagai saran untuk Masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan di kecamatan sungkai jaya

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas mengenai permasalahan yang sama dengan karya ilmiah, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)” dan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jurnal politik profetik karya Ahmad mustanir dan partisan abadi tahun 2017 dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten rappan.” jurnal ini membahas tentang partisipasi masyarakat di kelurahan kanyuara kecamatan sidereng terbilang dalam kategori kurang berpartisipasi dalam forum musrenbang di karenakan komunitas Tomawi yang kebanyakan berasal dari kelurahan kanyuara lebih menerima dan mendengarkan perkataan dari Uwa dan Uwita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ketimbang apa yang dijelaskan oleh kepala kelurahan yang bukan berasal dari Komunitas Tomawi Tolotang.¹³ Jurnal ini menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah di metode nya, peneliti menggunakan metode kualitatif sedangkan jurnal karya ahmad mustanir dan partisan abadi menggunakan metode kuantitatif.
2. Jurnal governance karya Gerry Rumegang, Johanis E. Kaawoan dan Ismail Sumampouw. Tahun 2021 Yang

¹³ Ahmad Mustanir. *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang*. Jurnal Politik Profetik, 5(2), 247-261. (2017)

berjudul tentang "Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud." Jurnal ini mendapatkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas terkait hasil musrenbang desa khususnya pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut disebabkan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan sebuah prioritas dan kebutuhan dari masyarakat yang ada, namun ada Sebagian juga masyarakat yang merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari musrenbang yang ada. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif.¹⁴ Perbedaan penelitian ini ada di sub focus penelitian dan metode yang digunakan, jurnal karya Gerry Rumegang, Johanis E. Kaawoan dan Ismail Sumampouw berfokus pada efektivitas Musrenbang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti berfokus pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dan menggunakan Metode Kualitatif.

3. Jurnal jurusan ilmu pemerintahan karya Ricardo Tahulending, Markus Kaunang dan Ismail Sumampouw tahun 2019, Yang berjudul tentang " Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di desa sonsilo kecamatan likupang barat". Jurnal ini membahas tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah rencana pembangunan di desa atau yang biasa di sebut dengan musrenbang desa sebab masyarakat merasa bahwa pemerintah desa tidak membuka ruang diskusi yang efektif untuk membicarakan semua usulan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pembangunan di desa Sonsilo. Kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemerintah desa yang tidak melibatkan warga untuk bermusyawarah bersama dan bermufakat membangun desa

¹⁴ Gerry Rumegang, Johanis E Kaawoan & Ismail Sumampow. (2021). *Efektivitas Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud*. Governance, 1(2). (2021)

bersama-sama karena masyarakat hanya menjadi figuran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif¹⁵. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah pada tingkatan Musrenbang, jika jurnal karya Ricardo Tahulending tingkatan musrenbang desa, skripsi peneliti pada tingkatan Musrenbang Kecamatan.

4. Skripsi karya Muhtardin tahun 2021 yang berjudul tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020”, skripsi ini memiliki titik focus pada bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang di desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu . jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode Kualitatif Deskriptif, sedangkan perbedaannya terletak pada sub focus penelitian, skripsi karya Muhtadin berfokus pada Faktor Penghambat Musrenbang, sedangkan, Penelitian peneliti berfokus pada Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
5. Skripsi karya A.M Dirga Firgiawan tahun 2018 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)”. Skripsi ini memiliki titik focus untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat

¹⁵ Ricardo Tahulending, Markus Kaunang, & Ismail Sumampouw. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat*. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1).(2018)

¹⁶ Muhtardin . *Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dmpu Tahun 2020*. (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram) (2021)

terwujudnya komunikasi partisipatif masyarakat. A.M Dirga Firgiawan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁷ Persamaan penelitian ini adalah di metode penelitian, dan perbedaan Skripsi karya A.M Dirga Firgiawan dengan penelitian peneliti adalah terletak pada titik focus, berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat, Penelitian peneliti berfokus pada Kesesuaian usulan Musrembang tiap tingkatan dan juga daftar kehadiran tiap tingkatan musrembang.

6. Skripsi karya Dini Aldina S, tahun 2017. Yang berjudul “ Peran aktor dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSREMBANGDES) Di desa sei alim ulu kecamatan air baru kabupaten asahan”. Skripsi ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran yang dilakukan oleh aktor sebagai stakeholder dan sebagai perwakilan masyarakat, dalam menyampaikan sebuah usulan perencanaan pembangunan desa dan mempertahankan usulan untuk menjadi prioritas usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrenbang Desa, yang kemudian akan diajukan pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif.¹⁸ Persamaan Skripsi Karya Dini Aldina S adalah sama sama menggunakan Metode Kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah pada focus penelitian, berfokus pada peran actor dalam Musrembang Desa, sedangkan Skripsi peneliti

¹⁷ A.M Dirga Firgiawan. *Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). (2020)

¹⁸ Dini Aldina. *Peran Aktor dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). (2018)

berfokus pada Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan dengan melihat kesesuaian usulan dan kehadiran dalam rapat.

7. Skripsi Karya Dewi Liya, Tahun 2022. Yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan” Skripsi ini membahas tentang proses penyelenggaraan Musrenbang dalam menghimpun aspirasi masyarakat serta faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan Musrenbang. Menggunakan metode penelitian yakni metode kualitatif.¹⁹ Persamaan Skripsi karya Dewi Liya dengan Skripsi yang peneliti adalah sama sama menggunakan metode Kualitatif, Sedangkan perbedaanya terletak pada focus penelitiannya, Skripsi karya dewi liya berfokus pada bagaimana penyelenggaraan musrenbang dalam menyerap aspirasi masyarakat dan apa faktor penghambat dan pendukung, sedangkan focus penelitian yang teliti peneliti adalah Kesesuaian usulan Musrenbang tiap tingkatan dan juga daftar kehadiran tiap tingkatan musrenbang

H. Metode Penelitian

Menurut Sudaryono, Metodologi Penelitian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang direncanakan oleh peneliti agar berguna untuk masyarakat atau bagi peneliti²⁰. Dari penjelasan diatas metodologi penelitian dapat dipahami sebagai sebuah cara untuk memecahkan sesuatu permasalahan dengan cara yang sistematis dengan mengumpulkan lalu menganalisis data yang akhirnya dapat berguna.

¹⁹ Dewi Liya. *Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan* ((Doctoral dissertation, UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi) 2022

²⁰ Dr.Sudaryono, *metodologi penelitian* (Depok : Rajawali pers, 2017). Hal 205

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilaksanakan dalam kehidupan yang sebenarnya dilaksanakan di lapangan dengan responden.²¹ Menurut Suharismi, penelitian lapangan (Field research) yakni satu penelitian yang dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan mengangkat data yang ada di lapangan.²²

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan memiliki tujuan untuk mengungkap gejala secara komprehensif dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.²³

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang mampu memperoleh data. Lalu apabila peneliti memakai wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber dari data yang didapatkan disebut Narasumber. Orang yang akan menjawab dan merespon pertanyaan pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Kartini Kartono. *Pengantar metodologi social*. Bandung, Mandar Maju 1996), hal 32

²² Suharismi Arikunto, *Dasar dasar research* (Bandung : tarsoto : 1995) hal 58

²³ Eko sugiarto, *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. (Yogyakarta: suaka media,2015) hal 8

a. Data Primer

Data yang peneliti peroleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi secara langsung dengan menggunakan instrument instrument yang ada.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan kriteria tertentu²⁴. Di Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel untuk menjadi sumber data primer adalah Camat, Aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan anggota masyarakat di kecamatan Sungkai Jaya berjumlah 10 orang. Untuk menentukan key informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

- a. Subyek merupakan peserta yang mengikuti musyawarah rencana pembangunan di kecamatan Sungkai Jaya.
- b. Subyek mengetahui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan
- c. Subyek memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subyek mampu memberikan informasi yang objektif dan tidak cenderung seolah olah dibungkus

Data primer dihimpun guna membantu menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian dan untuk tujuan mengambil keputusan. Dari kriteria informan diatas, Peneliti memutuskan informan yang diwawancarai sebagai berikut.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D* hal 301

Tabel 1.1
Daftar Nama Para Stakeholder Kecamatan/Desa

No	Nama	Jabatan
1	Zainal Abidin	Kepala Desa Cahaya Makmur
2	Pasriadi	Kepala Desa Suka Jaya
3	Hairil Basri	Kepala desa Sri Jaya
4	Hermansyah	Tokoh Adat Desa Suka Jaya
5	Des Putra Adami	Camat Sungkai Jaya
6	Hj.Rizki Puspa Dewi, SE.MM	Kepala Desa Cempaka
7	Saritaria Mega, S.E	Kepala Desa Lembang Tengah
8	Dirsa Mahadi	Tokoh Masyarakat Sri Agung
9	Edi putra	Sekretaris Desa cempaka timur
10	Cik Agus Rony,S.Pd	BPD Desa Cempaka

b. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang tidak didapat peneliti secara langsung, melainkan melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain²⁵. berikut ini data sekunder yang peneliti dapatkan :

Tabel 1.2
Data sekunder

No	Jenis File	Sifat File
1.	Profil Kecamatan	Soft File
2.	Data Kependudukan	Soft file
3.	Berita Acara Musrembang Kecamatan Tahun 2022.	Soft File
4.	Berita Acara Musrembang Desa	Soft file
5	Berita Acara Musyawarah Dusun	Soft file

²⁵ Mukhtazar, *teknik penyusunan skripsi*, (Yogyakarta: absolute media, 2012), hal 43

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data di dalam penelitian ini untuk mendukung penelitian dan mempermudah mencari data data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Ada 3 tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau biasa disebut pengamatan langsung merupakan sebuah Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap kondisi di lingkungan objek penelitian sehingga mendukung kegiatan penelitian dan bisa mendapatkan gambaran jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²⁶ Peneliti melaksanakan observasi ke Kecamatan Sungkai Jaya. Ketika ingin memulai penelitian, peneliti melakukan pra riset atau turun lapangan sebelum penelitian dilaksanakan untuk mendapatkan data awal dalam proses penelitian. Setelah memberikan surat pengantar kepada instansi yang dituju yaitu di Kecamatan Sungkai Jaya untuk mendapatkan izin untuk melakukan pra riset di lokasi tersebut. Peneliti memulai penelitian yang diawali dengan mendatangi peneliti berdialog Sekretaris Camat Sungkai Jaya dan Camat Sungkai Jaya agar mendapatkan informasi yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang terkait dengan fakta, keyakinan, keinginan dan sebagainya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan

²⁶ Dr.Sudaryono, *metodologi penelitian* (Depok : Rajawali pers, 2017). Hal 216

penelitian.²⁷ Pada proses ini peneliti menggunakan pedoman atau panduan wawancara yang disediakan peneliti. Dan yang diwawancarai dapat dilihat di table 1.1

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya..²⁸

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang di dapatkan dari studi dokumentasi dan wawancara akan dianalisis dengan Teknik analisis data kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Teknik Analisa data yang dipakai adalah metode induktif, dimulai dengan reduksi data, penyajian data serta verifikasi data.²⁹

a. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.³⁰ Dalam penelitian ini, reduksi data dilaksanakan dengan mengelompokkan data hasil dari wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari setiap responden.

b. Penyajian data

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sehimpun informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

²⁷ Eko sugiarto, (2015), *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. yogyakarta, suaka media hal 5

²⁸ Kamus Besar Bahasa indonesia

²⁹ Sugiyono,hal 337

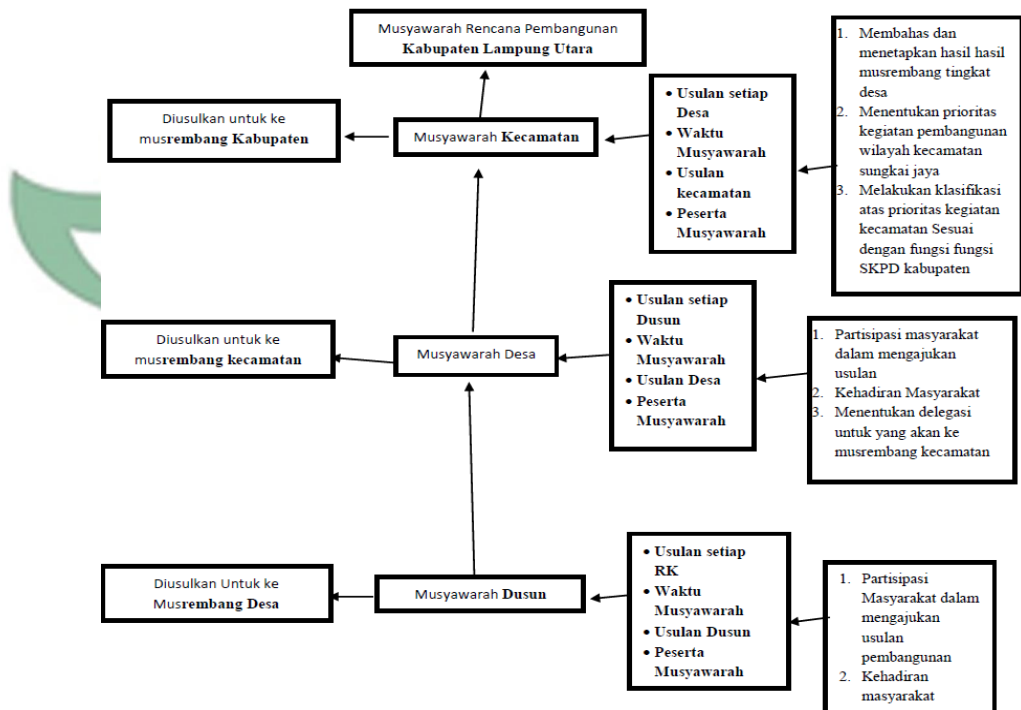
³⁰ Agusta, Ivanovich. (2003) "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27. Hal 10

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya³¹ Manfaat dari melaksanakan penyajian data dalam sebuah analisis data kualitatif adalah akan mempermudah untuk memahami tentang apa yang akan terjadi, lalu merencanakan kerja setelahnya berdasarkan apa yang telah dimengerti.³²

c. Verifikasi data

Menurut artina Sri Ayu (2016), verifikasi data merupakan metode akhir yang dipakai untuk meyakinkan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak cacat dan akurat.³³

I. Kerangka Teoritik



Grafik 1.1 : Kerangka Teoritik

³¹ *Ibid* hal 10

³² Sugiyono, 341.

³³ Sugiyono, 345.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bersifat Top Down atau usulan yang berasal dari bawah keatas, sehingga menjadi ruang khalayak umum yang berguna untuk menghimpun aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan yang akan datang dimulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Musrempang dimulai dari tingkat paling rendah yakni musyawarah dusun, musyawarah dusun akan diusulkan ke musyawarah desa. Pada tingkatan ini menghasilkan usulan usulan tiap dusun pada forum musyawarah dusun. Semua masyarakat dusun dilibatkan pada forum tersebut lalu musyawarah desa akan diusulkan ke musyawarah kecamatan, pada jenjang ini forum hanya diwakilkan oleh perwakilan tiap desa untuk menentukan prioritas pembangunan desa untuk dibawa pada forum musyawarah kecamatan . lalu forum musyawarah kecamatan, forum musyawarah kecamatan akan menentukan prioritas usulan pembangunan kecamatan yang ditentukan dari tiap tiap desa. Pada forum ini, masyarakat yang dilibatkan hanya delegasi yang ditentukan pada musyawarah desa yang akan membahas dan menetapkan hasil hasil Musrempang tingkat desa, menentukan prioritas pembangunan kecamatan Sungkai Jaya, dan Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan kecamatan Sesuai dengan fungsi fungsi SKPD kabupaten.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni:

Bab I, berisikan pendahuluan yang diawali dengan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan sebagai penutup.

Bab II, berisikan tentang landasan teori partisipasi masyarakat secara mendalam

Bab III, berisikan gambaran umum dari objek penelitian, yakni sejarah Kecamatan Sungkai Jaya, Kondisi Geografis, Penduduk, Mata Pencaharian, Sarana dan Prasarana Pendidikan,

potensi, Struktur Organisasi Kecamatan Sungkai Jaya, Visi dan Misi Kecamatan Sungkai Jaya

Bab IV, berisikan tentang analisis data penelitian dari Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di kecamatan Sungkai jaya Tahun 2022

Bab V, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Sungkai Jaya Tahun 2022



BAB II LANDASAN TEORI MUSRENBANG

A. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memusatkan pada “Partisipasi” langsung warga negara didalam mengambil sebuah keputusan baik dilembaga maupun proses negara. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan kegiatan dalam pembangunan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur demokrasi, karna merupakan hasil musyawarah mufakat untuk kepentingan Bersama.

Isbandi menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dilingkungan mereka, memilih solusi untuk mengatasi masalah, melaksanakan Tindakan untuk menyelesaikan masalah, dan terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi³⁴. Dalam proses perencanaan pembangunan sebuah daerah, partisipasi masyarakat menawarkan sebuah proses kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam menentukan tujuan Bersama, membuat keputusan secara kolektif, dan menciptakan ruang ruang yang menjadi tempat untuk menyatakan keinginan mereka³⁵.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keterlibatan masyarakat guna memperhatikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam konteks pembangunan Adisasmita

³⁴ Isbandi Rukminto, “Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas : dari pemikiran menuju penerapan,” *Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007*.

³⁵ Nur islamiah, “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sanglempongan kecamatan curio kabupaten enrekang”(Universitas Negeri Alaudin Makassar, 2018)

(2006:38) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan yang dilakukandi masyarakat local. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat menunjukkan kesediaan dan kemauan mereka untuk berkontribusi dan berkorban dalam menjalankan program pembangunan.³⁶

Adisasmita menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup pada pemberdayaan masyarakat serta peran aktifnya dalam Menyusun perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan. Serta menunjukkan kesediaan dan kemauan masyarakat afar berkontribusi serta berkorban demi keberhasilan implementasi pembangunan. Prinsip partisipasi memerlukan pemberdayaan masyarakat, memberikan kesempatan dan melibatkan mereka dalam proses birokrasi dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai control terhadap kekuasaan yang berlebihan, sehingga dapat efektif dilakukan untuk masyarakat dalam konsep good governance. Adanya keterlibatan masyarakat serta struktur kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendukung pembangunan serta pemerataan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diusahakan menjadi lebih terstruktur, maka rencana serta program pembangunan yang disusun itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diana Conyers (1992:154) menjelaskan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu³⁷ :

³⁶ Rahardjo Adisasmita . Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2006 hal 38

³⁷ Diana Conyers. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992 hal 154

1. Partisipasi masyarakat adalah suatu alat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat sekitar yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta program program akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka merasa diikutsertakan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan memiliki rasa memiliki terhadap program tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa masyarakat pun mempunyai hak (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka

Menurut Rustian Kamaluddin dengan berpartisipasinya masyarakat secara aktif dalam forum musrenbang, masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah yang mereka hadapi sebagai bagian dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang sehingga masyarakat enggan hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga dianggap sebagai subjek³⁸.

2. Bentuk Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam Siregar (2001:19)39 mengemukakan bahwa partisipasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, partisipasi dapat dilihat sebagai sumbangan sukarela masyarakat terhadap suatu program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pewujudan program, serta turut merasakan manfaat dari program pembangunan. Kedua, partisipasi juga dapat

³⁸ Rustian Kamaluddin. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1992), hal 184.

³⁹ Siregar. Tesis Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, Universitas Indonesia, Depok, 2001 hal 19

diartikan sebagai peningkatan control masyarakat terhadap sumber daya dan pengaturan instansi instansi dalam situasi social yang ada. Untuk menaikkan partisipasi masyarakat, penting bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat komunitas.

Partisipasi masyarakat juga termanifestasikan dalam berbagai wujud, Rusidi dalam Siregar (2001:21)⁴⁰ berpendapat ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Menurut Thubany yang dikutip oleh Purnamasari (2006:23)⁴¹ berpendapat bahwa partisipasi penuh dari masyarakat dapat tercapai apabila struktur institusi memungkinkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta menentukan kebijakan terkait masalah sehari hari mereka. Selain itu, representasi masyarakat juga harus terwakili secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan Bersama. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat harus didasarkan kepada :

1. pembuatan keputusan,
2. penerapan keputusan,
3. menikmati hasil, dan
4. evaluasi hasil.

⁴⁰ Siregar. Tesis Penanggulanagn kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, Universitas Indonesia, Depok, 2001 hal 21

⁴¹ Dewi Purnamasari. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, Universtas Indonesia. Jakarta, 2006 hal 23

Sementara empat aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni :

1. informasi atau akses lainnya;
2. inisiatif (voice/suara) dan apresiasi warga (masukan),
3. mekanisme pengambilan keputusan;
4. kontrol pengawasan.

Dilihat dari pengertian partisipasi yang telah berkembang, tidak lagi diasumsikan bahwa partisipasi hanya sebatas sumbangan uang atau sumber daya dari masyarakat secara sukarela. Namun, pengertian partisipasi lebih mekankan kepada pengembangan kapasitas masyarakat, yang mencakup keikutsertaan mereka dalam informasi, pengambilan keputusan, serta control dan pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak pada masa depan masyarakat tersebut..

Salah satu teori partisipasi yang banyak dijadikan acuan adalah tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein pada tahun 1969 yang dikenal sebagai “A Ladder of Citizen Participation”, teori ini membagi partisipasi menjadi delapan tingkatan yang saling terkait seperti anak tangga, yang dijelaskan (Mufidayati, 2012). Delapan tingkatan partisipasi tersebut, terdiri dari :

1. Tingkatan pertama disebut manipulasi. Dimana tidak ada komunikasi atau dialog antara masyarakat dan pengambil keputusan.
2. Tingkat kedua disebut therapy. Sudah ada komunikasi satu arah, tetapi inisiatif dan pengambilan keputusan masih sepenuhnya ditangan pemerintah.
3. Tingkat ketiga disebut penginformasian (information). Sudah banyak komunikasi yang terlaksana tetapi masih satu arah tanpa diskusi.

4. Tingkat keempat disebut konsultasi. Komunikasi sudah berjalan dua arah, tetapi masyarakat belum bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Tingkat kelima disebut placation. Sudah ada dialog atau musyawarah Bersama antara masyarakat dan pemerintah..
6. Tingkat keenam disebut kemitraan (partnership). Masyarakat sudah bisa menjadi mitra sejajar pemerintah..
7. Tingkat ketujuh disebut delegasi kewenangan (delegated power). Pemerintah memberikan kewenangan kepada warga masyarakat untuk berinisiatif mengurus beberapa keperluannya secara mandiri.
8. Tingkat kedelapan disebut kontrol warga (citizen control). masyarakat sudah mampu mempengaruhi kebijakan publik secara penuh mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi⁴².

Dilihat dari penjelasan diatas, tingkat partisipasi pertama dan kedua dikategorikan sebagai ketiadaan partisipan (non-participant). Tiga tingkat berikutnya dianggap sebagai tingkat tipuan atau sekadar peredaman (tokenism), di mana pandangan masyarakat di dengarkan tetapi hanya digunakan sebagai pertimbangan oleh pengambil keputusan tanpa menghasilkan perubahan yang drastis. Sedangkan tiga tingkat terakhir dikategorikan sebagai tingkat kekuasaan masyarakat (citizen power), dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

B. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrempang)

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum para pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan rencana pembangunan daerah dan nasional. Indra Bastian (2009:34)⁴³ menjelaskan bahwa Musrenbang wajib dilaksanakan

⁴² Heru Cahyono, & Kurniasih Mufidayati. *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), (2021) 173-194.

⁴³ Indra Bastian. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta, 2009 hal 34

dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, dengan melalui empat tahapan yaitu tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, dan Musrenbang tingkat Provinsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan bahwa *“setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”*. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa *“masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”*.

Dalam Musrenbang, Partisipasi warga menjadi sarana pemberdayaan karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan usulannya dan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat memberikan Manfaat dalam jangka panjang berupa peningkatan keterampilan politik masyarakat, termasuk kemampuan bernegosiasi dan menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. Musrenbang Kecamatan

lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Musrenbang Kecamatan adalah sebuah forum musyawarah diantara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyetujui Tindakan Tindakan dalam mengatasi program kegiatan yang menjadi prioritas, yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan. Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan harus dilakukan minggu ketiga bulan Februari paling lambat.⁴⁴

⁴⁴ Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indra Bastian (2009:118) mengatakan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan sebuah forum musyawarah yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan guna untuk memperoleh masukan terkait prioritas kegiatan yang diajukan oleh desa/kelurahan di kecamatan tersebut. Hal ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.⁴⁵

Stakholder dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku baik termasuk pemandu, peserta, narasumber. Penting untuk tidak melanggar prinsip-prinsip ini agar musrenbang kecamatan dapat menjadi wadah dalam musyawarah pengambilan keputusan Bersama dan Menyusun program kegiatan pembangunan tingkat kecamatan. bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan., beberapa prinsip musrenbang kecamatan yang harus diikuti antara lain yaitu :

- a. **Prinsip kesetaraan.** Peserta musyawarah merupakan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya juga, memiliki kewajiban setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.
- b. **Prinsip musyawarah.** Peserta Musrenbang kecamatan memiliki keberanekaragaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan lain-lain. Perbedaan serta berbagai sudut pandang tersebut diinginkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat umum di atas kepentingan individu atau golongan.

⁴⁵ Indra Bastian. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. hal 118

- c. **Prinsip anti-dominasi.** Dalam forum, tidak ada kelompok ataupun individu yang dominan dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak membuat proses musyawarah tercederai.
- d. **Prinsip keberpihakan.** Memberikan dorongan kepada kelompok atau individu yang paling rentan atau tidak memberikan usulan seperti masyarakat miskin dan perempuan.
- e. **Prinsip anti-diskriminasi.** Semua warga kecamatan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Musrenbang. Tidak ada kelompok yang terisishkan atau terpinggirkan.
- f. **Prinsip pembangunan kecamatan holistik.** Musrenbang kecamatan dimaksudkan untuk menentukan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan secara utuh bukan tersekat-sekat pada wilayah desa. Oleh sebab itu dalam Musrenbang kecamatan perlu didorong untuk melihat permasalahan pembangunan secara utuh ditingkat kecamatan, bukan lagi dibatasi oleh egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.⁴⁶

2. Tujuan Musrenbang Kecamatan

Secara umum, Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan mengenai kegiatan pembangunan dari masyarakat di wilayah tersebut yang selaras dengan rencana-rencana pembangunan yang lagi disusun oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat sektoral maupun kewilayahan. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan optimalisasi rencana pembangunan yang diperoleh dari menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya di daerah tersebut. Tujuan musrenbang kecamatan adalah :

⁴⁶ Ria Novita Sari. *Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. hal 22

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan ditingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota

C. Perencanaan Pembangunan

Indonesia memiliki Strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dengan kebijakan pembangunan sectoral dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di pedesaan. Pembangunan desa diarahkan untuk menjadi cara pembangunan masyarakat sebagai subjek pembangunan, program, dan Gerakan masyarakat yang didasari oleh kesadaran agar meningkatkan kualitas hidup. Hal ini bersifat multisectoral.⁴⁷

Perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial di Indonesia mengingat terbatasnya sumber daya ekonomi yang semakin menipis dan populasi penduduk yang sangat banyak serta heterogeny, serta rendahnya tingkat Pendidikan dan kemampuan manajerial di masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan nasional, diperlukan program program pembangunan yang berfokus kepada pengembangan desa agar dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di pedesaan. Saat ini, pemerintah seakan kurang memperhatikan keadaan masyarakat di desa dengan terlihat masih banyaknya desa yang belum tercakup dalam program pembangunan yang mampu membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka

⁴⁷ M Slamet, *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2003), Hal 34

Secara umum, Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha dari masyarakat bangsa untuk mengubah secara besar besaran berbagai aspek kehidupan kearah kemajuan dan kebaikan yang sesuai dengan pandangan masyarakat tersebut, seperti yang dijelaskan Tjokroamidjojo pada tahun 1996⁴⁸, biasanya ,Ciri-ciri dari perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkaitan pula dengan peran pemerintah sebagai pendorong pembangunan (Agen of Development).

Pasal 260 dari bab tentang perencanaan pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah yang memiliki kewenangan, harus membuat rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari system perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya terencana untuk menggapai kemajuan social dan ekonomi yang stabil (Steady Social Economy growth), yang tercermin dalam rencana meningkatkan produk nasional dengan mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang positif harus dipertimbangkan dengan arus pertumbuhan penduduk agar dapat menunjukkan peningkatan per kapita.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi otonomi daerah, dimana salah satu nya adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipatif dari tingkat bawah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan keamatan merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan daerah dan nasional yang saling terkait.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pasal 29 ayat (1) menyebutkan, "*Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun*

⁴⁸ Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta:PTGunung Agung, 1996),hal .48

perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan”.

Penelitian ini mengambil konsep dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa pelaksanaan Musrenbang harus mewajibkan pemerintah desa untuk mengakomodir masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung maupun perwakilan, menyesuaikan keadaan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Aqil, irham Muhammad, (2016), "*DEMOKRASI MUKA DUA : Membaca ulang pilkada di Indonesia*" keputakaan populer Gramedia, Jakarta
- Agusta, Ivanovich. (2003) "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*
- Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indra, Bastian. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta
- M, Slamet, 2003 *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, IPB Press, Bogor
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipt. Jakarta
- Sugiarto eko, (2015), *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*. yogyakarta, suaka media
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D*. Jakarta: Alfabeta D. Jakarta: Alfabeta
- Tjokroamidjojo,Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta:PTGunung Agung, 1996)

Sumber Jurnal

- Ardhanariswari, R., Nasihuddin, A. A., Supriyanto, S., & Sukirman, S. (2017). Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 625-643.

- Azhar, Fikri. (2015) "*Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.*" *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3 (2015)
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173-194.
- Deviyanti, Dea. (2013)"Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah." *Jurnal Administrasi Negara* 1.2
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado." *Jurnal GOVERNANCE* 1.
- Khabib Alia Akhmad, (2015), Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta), Volume 9 Nomor 1 September 2015
- Laily, Elida Imro'atin Nur, and Elida Imro'atin. "Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3.2 (2015):
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rapping. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261
- Rumegang, G., Kaawoan, J. E., & Sumampow, I. (2021). Efektivitas Musreimbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Governance*, 1(2).
- Supeno, Eko. 2005. "*Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya*".

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol 18, No 2.

Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).

Sumber Skripsi

Aldina, D. (2018). Peran Aktor dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang Desa) di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Firgiawan, A. M. (2018). Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (Studi Komunikasi Pembangunan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Liya, D. (2022). Efektivitas Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan ((Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi

Muhtardin, M. (2021). Partispasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dmpu Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Purnamasari, Dewi. (2006). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan, (Universtas Indonesia. Jakarta.)

Sari, Ria Novita. 2017 Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. (Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Salwa, Salwa. (2021) peran pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin . (Diss. Universitas Islam Kalimantan)

Siregar. I. (2001), Tesis Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, (Universitas Indonesia, Depok.)

Shofiati, N. (2020). Nilai-nilai Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an (Studi Kepustakaan Surat Ali-Imron Ayat 159-160 Dalam Kitab Tafsir Misbah Karangan Muhammad Quraish Shihab) (Universitas Islam Malang, Malang)

Wibowo, Baso Frianto. (2015) Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014. (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Sumber Hukum

Nomor, P.P (8) Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Nomor, P.P (19) Tahun 2008 tentang Kecamatan

Nomor, U.U. (23) Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Nomor, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Al Quran

Q.S Al Imran ayat 159

Sumber internet

Kbbi.com. Kamus besar Bahasa Indonesia- partisipasi.diakses pada 27 July 2022, dari <https://kbbi.web.id/partisipasi>

hadist.id. Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4789 - Kitab Nikah, diakses pada 27 febuari 2023, dari <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4789>

